PERNYATAAN SIKAP
DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) HARAKAH BAKOMUBIN JAWA BARAT
ATAS TINDAKAN PENGGEREBEKAN APARAT KEPOLISIAN DI PONDOK PESANTREN HAMALATUL QUR'AN, SUKOHARJO
Nomor: 55/PS/DPW-HB/JABAR/XI/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus sikap tegas atas tindakan penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di lingkungan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Sukoharjo.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam, dakwah, pembinaan akhlak, serta pencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kontribusi besar dalam membangun kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum di lingkungan pesantren harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, terukur, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam penguatan dakwah dan pembinaan para mubaligh, DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat memandang bahwa penegakan hukum harus senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan lembaga pendidikan Islam, serta asas praduga tidak bersalah.

Negara hukum tidak memberikan ruang bagi tindakan aparat yang sewenang-wenang. Penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan menjalankan pendidikan serta dakwah.

Atas peristiwa tersebut, DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat menyatakan sikap sebagai berikut:

1. MENGECAM TINDAKAN APARAT YANG TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK PROPORSIONAL

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat mengecam keras segala bentuk tindakan aparat kepolisian yang dalam pelaksanaannya tidak profesional, tidak proporsional, mengabaikan prosedur hukum, serta tidak mengindahkan SOP kepolisian.

Tindakan aparat penegak hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, terlebih apabila sampai mencederai kehormatan, martabat, dan rasa aman lingkungan pendidikan pesantren.

2. MENDESAK KAPOLRI MELAKUKAN INVESTIGASI SECARA MENYELURUH

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat mendesak Kapolri untuk memerintahkan pemeriksaan dan investigasi secara menyeluruh, objektif, transparan, dan independen terhadap seluruh aparat yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran SOP, penyalahgunaan kewenangan, tindakan tidak profesional, ataupun pelanggaran hukum lainnya, maka aparat yang terbukti melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. MENUNTUT PERLINDUNGAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk senantiasa menghormati keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki jasa dan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun karakter dan moral generasi muda.

Setiap tindakan kepolisian di lingkungan pesantren harus mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, profesional, dan tetap menghormati hak-hak para kiai, ustaz, santri, serta seluruh warga pesantren.

4. MENDESAK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENEGAKAN HUKUM

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat meminta pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, alasan, serta prosedur pelaksanaan tindakan penggerebekan tersebut kepada publik, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan bahwa setiap tindakan aparat benar-benar dilaksanakan berdasarkan hukum.

5. MENYERUKAN SOLIDARITAS DAN PERLINDUNGAN TERHADAP DUNIA PESANTREN

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat mengajak seluruh elemen umat Islam, para ulama, kiai, pimpinan pondok pesantren, mubaligh, serta organisasi kemasyarakatan Islam untuk bersama-sama menjaga kehormatan dan marwah lembaga pendidikan pesantren.

Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, serta mengawal persoalan ini melalui mekanisme hukum dan konstitusional.

DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat berdiri bersama perjuangan menjaga kehormatan pesantren, melindungi hak-hak warga negara, dan menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan.

PENUTUP

Kami menegaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Oleh sebab itu, setiap tindakan kepolisian harus tunduk pada hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai penegakan hukum justru mencederai rasa keadilan masyarakat, merendahkan martabat lembaga pendidikan Islam, dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Pesantren harus dihormati, ulama dan santri harus dilindungi, hak-hak warga negara harus dijamin, dan hukum harus ditegakkan tanpa kesewenang-wenangan.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, kepedulian, dan komitmen DPW Harakah BAKOMUBIN Jawa Barat dalam menjaga kehormatan pesantren, memperjuangkan keadilan, serta mengawal tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, 2 November 2026

DEWAN PIMPINAN WILAYAH
HARAKAH BAKOMUBIN JAWA BARAT

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
Prof. Dr. KH. Moh. Najib., M.Ag	**Dr. KH. Budi Saepuddin., M.Ag**